I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Kemajuan dan perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung menunjukkan trend ke arah zona ekonomi sebagai kota metropolitan, kondisi ini adalah sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam membangun daerah yang strategis, baik dari letak geografisnya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan letaknya yang relative dekat dengan Ibukota Republik Indonesia, selain itu potensi sumber daya alam yang terkandung di Bumi Lampung yang berlimpah.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perencanaan karena pembangunan adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui beberapa proses jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan dasar pijakan dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu juga perlu diawasi dan dievaluasi hasil-hasilnya, oleh sebab itu diperlukan berbagai informasi/data untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu, masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengawali pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Salah satu alat ukur sebagai indikator kemajuan perekonomian satu wilayah adalah pendapatan regional perkapita yang biasanya digunakan sebagai indikator dari tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB perkapita penduduk, apabila desertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Dalam kenyataannya, meskipun PDRB perkapita tidak dapat sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini masih dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Dasar pendekatan untuk menghitung pendapatan regional perkapita Kota Bandar Lampung menggunakan PDRB harga konstan tahun 2000.

Dari kemajuan ekonomi satu wilayah yang digambarkan oleh peningkatan tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita memiliki dampak kedepan *(forward linkage)*, seperti tingginya pola permintaan akan barang-barang kebutuhan untuk

dikonsumsi dan peluang ini dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah melalui pajak.

Kemajuan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat berhubungan positif pada penerimaan pemerintah yaitu melalui sumber penerimaan dari pajak. Kemajuan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada perkembangan tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kota Bandar Lampung periode tahun 2005 – 2010 pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Bandar Lampung (%)

Tahun	Pendapatan Regional Perkapita	Pertumbuhan %
2005	4.648.321	-
2006	4.954.928	6,60
2007	5.138.409	3,70
2008	5.511.572	7,26
2009	5.835.249	5,87
2010	6.128.093	5,02

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Pada tabel 1. tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Bandar Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yakni dari pendapatan regional perkapita pada tahun 2005 sebesar Rp. 4.648.321,00 pada

tahun 2006 sebesar Rp. 4.954.928,00 dan Rp. 5.138.409,00 pada tahun 2007, sebesar Rp. 5.511.572,00 pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.835.249,00 dan meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.128.093,00 atau sebesar 5,02 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, sehingga indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukan adanya peningkatan perekonomian, dan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukan adanya penurunan perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah sektor perekonomian suatu daerah. Kesanggupan mencapai pertumbuhan tersebut juga merupakan refleksi dari kondisi ekonomi pada periode yang bersangkutan.

Pendapatan Regional dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional, khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilakan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk melihat perekonomian secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2010 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, peternakan dan perikanan	201.158	210.140	210.340	231.358	238.175	247.577
2	Pertambangan dan penggalian	75.471	80.686	77.288	75.905	74.714	72.574
3	Industri pengolahan non migas	706.670	746.367	798.200	918.547	1.014.690	1.064.500
4	Listrik dan air bersih	39.925	40.631	41.214	35.319	37.918	39.050
5	Bangunan	379.389	387.569	392.272	396.438	419.001	445.025
6	Perdagangan, hotel dan restoran	908.636	948.289	968.952	972.055	999.763	1.037.250
7	Pengangkutan dan komunikasi	674.531	738.202	790.381	821.273	849.185	890.121
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	480.475	634.984	725.941	842.867	997.415	1.159.261
9	Jasa-jasa	758.586	762.595	773.600	785.284	795.292	840.638
Total PDRB Tanpa Migas		4.224.841	4.549.463	4.778.188	5.079.046	5.426.153	5.795.996

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukan struktur perekonomian yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuannya menciptakan nilai tambah. Hal tersebut mengambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Adapun sektor-sektor yang mendukung laju pertumbuhan PDRB adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan non migas, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2010 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, peternakan dan perikanan	-	4,47	0,10	9,99	2,95	3,95
2	Pertambangan dan penggalian	-	6,91	-4,21	-1,79	-1,57	-2,86
3	Industri pengolahan non migas	-	5,62	6,94	15,08	10,47	4,91
4	Listrik dan air bersih	-	1,77	1,43	-14,30	7,36	2,99
5	Bangunan	-	2,16	1,21	1,06	5,69	6,21
6	Perdagangan, hotel dan restoran	-	4,36	2,18	0,32	2,85	3,75
7	Pengangkutan dan komunikasi	-	9,44	7,07	3,91	3,40	4,82
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	-	32,16	14,32	16,11	18,34	16,23
9	Jasa-jasa	-	0,53	1,44	1,51	1,27	5,70
	Total PDRB Tanpa Migas	-	7,68	5,03	6,30	6,83	6,82

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung (diolah)

Sektor pertanian pada tahun 2010 laju pertumbuhan sebesar 3,95 persen, namun kontribusi sektor pertanian Kota Bandar Lampung yang paling berperan adalah dari perikanan, khususnya dari perikanan laut sesuai dengan letak goegrafis Kota Bandar Lampung yang dikelilingi oleh Teluk Lampung. Kota Bandar Lampung adalah sentra perikanan laut di Provinsi Lampung, bahkan mampu mensuplai ikan ke laut wilayah Bandar Lampung.

Sektor pertambangan dan penggalian, seperti halnya sektor pertanian, peternakan dan perikanan, kontribusinya terhadap perekonomian Bandar Lampung sangat kecil, bahkan paling kecil dibandingkan sektor-sektor yang lain. Dilihat dari trend laju pertumbuhan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, sektor ini mengalami penurunan. Pada tahun 2008 pertumbuhannya mencapai -1,79 persen, tahun 2009 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -1,57 persen, sedangkan untuk tahun 2010 sebesar -2,86 persen, atau memberi sumbangan PDRB sebesar 72.574 juta rupiah.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian di Provinsi Lampung, pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dalam kurun waktu lima tahun ini terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sektor industri ini meliputi industri besar, sedang, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Di Kota Bandar Lampung terdapat banyak industri yang mengolah hasil bumi yang berasal dari wilayah lain, misalnya industri pengolahan tapioka, minyak sawit dan lainnya. Disamping itu banyak industri yang dilakukan rumah tangga yang

berskala kecil, baik dilihat dari omset maupun penyerapan tenaga kerjanya. Laju perkembangan sektor ini mencapai 4,91 persen pada tahun 2010.

Listrik dan air bersih merupakan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Perusahaan listrik dan air bersih dikuasai oleh pemerintah, karena penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan sektor ini adalah sebesar 2,98 persen. Dan memberi sumbangan sebesar 39.050 juta rupiah.

Pada sektor bangunan di tahun 2010 mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 6,21 persen. Peran sektor bangunan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung dalam empat tahun terakhir menunjukan angka yang relatif stabil meskipun tidak terlalu besar bila dibandingkan sektor lainnya. Sumbangan yang dihasilkan oleh sektor ini pada tahun 2010 sebesar 445.025 juta rupiah.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sumbangan sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung sangat stabil, bahkan secara agregat sektor ini merupakan salah satu leading sektor. Posisi geografis Kota Bandar Lampung, yang merupakan pintu masuk Pulau Sumatera menjadikan sektor ini sangat menjanjikan. Secara kasat mata, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi menjadi barometer usaha perdagangan, yang ditandai dengan kemunculan pasar baru baik tradisional maupun modern. Perkembangan warung makan baik tradisional maupun siap saji juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor ini. Bertambah banyaknya pengguna jasa perhotelan di Kota Bandar

Lampung juga menyumbang meningkatnya sektor ini. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 3,75 persen pada tahun 2010.

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,82 persen pada tahun 2010. Kemajuan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung diikuti dengan proses terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung yang menuju pada kehidupan masyarakat di sektor nonpertanian atau menuju masyarakat industrialis, keadaan ini menimbulkan dampak yang positif terhadap sektor ini. Demikian pula dalam hal komunikasi, dimana masyarakat Kota Bandar Lampung dewasa ini menuntut layanan yang prima dalam hal berkomunikasi terlihat pada laju pertumbuhan subsektor ini pada empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

Pertumbuhan perekonomian Kota Bandar Lampung yang terjadi pada sektor lembaga keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Semakin maraknya perekonomian yang diwarnai dengan kemunculan beberapa bank diluar kota Bandar Lampung, menimbulkan dampak lembaga keuangan bukan bank banyak bermunculan di wilayah Bandar Lampung. Sebagai pusat pemerintahan serta pusat kegiatan ekonomi, Kota Bandar Lampung menjadi pusat kota yang banyak dituju oleh masyarakat diluar Bandar Lampung. Laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 16,23 persen pada tahun 2010.

Sebagai pusat pemerintahan, sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kota Bandar Lampung dan pertumbuhan sektor ini banyak dipengaruhi oleh subsektor swasta yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2010. Penduduk yang semakin bertambah senantiasa membutuhkan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jasa sosial kemasyarakatan menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang diminati. Kebutuhan akan hiburan dan rekreasi di Bandar Lampung juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan subsektor ini. Begitu juga dengan jasa perorangan dan rumah tangga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Subsektor pemerintahan umum juga mengalami peningkatan, hal ini sangat dimaklumi mengingat posisi Kota Bandar Lampung yang dekat dengan pemerintahan provinsi, sehingga indikator kebijakan publik banyak yang berpijak pada kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi non-migas sangat diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan devisa negara yang tentunya diarahkan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial

budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat serta terjadinya integrasi sosial.

Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya sekedar untuk meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan *(agent of development).* Pariwisata, bila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Secara makro, pariwisata sebagai suatu industri dapat meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, penambahan penerimaan pajak, retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan sekaligus akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran. Pariwisata yang bersifat multidimensi (multi aspek dan aktivitas) tersebut serta dinamis menggambarkan konstelasi pengembangan pariwisata saat ini dan masa datang yang harus dihadapi dan dipertimbangkan dalam penetapan tujuan pengembangan pariwisata di suatu daerah.

Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam), serta industri lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan *(agent of development)* sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung, hal ini disebabkan pariwisata merupakan salah satu primadona dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena

Provinsi Lampung sangat kaya akan potensi obyek wisata alam. Selain itu Provinsi Lampung juga telah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) sedangkan Kota Bandar Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh dalam bidang kepariwisataan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mencapai obyek wisata tersebut. Disamping itu, Kota Bandar Lampung juga mempunyai potensi wisata yang sangat baik dan didukung topografi tinggi berbukit dan dataran rendah dekat dengan pantai, oleh karenanya memungkinkan untuk dikembangkan.

Dampak ekonomi pariwisata ini bahkan melintas kedalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi. Besarnya peran pariwisata dalam perekonomian tidak diragukan. Dampak pariwisata terhadap perekonomian akan semakin bertambah besar dengan adanya investasi yang dilakukan dunia usaha dan pemerintah. Maka pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Penggalian sumber-sumber penerimaan daerah penting halnya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, hal ini penting mengingat kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan yang semakin lama semakin meningkat, dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan PAD. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus

dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Dahlia : 2000).

Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Adapun elemen-elemen penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Lainnya yang dipidahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan andalan PAD. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama di samping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2010 (Juta Rupiah)

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	PAD	Pertumbuhan %
2005	22,406,753	10,292,418	35,511,798	-
2006	22,304,069	10,498,677	36,689,576	3.32
2007	27,251,900	14,658,338	46,513,716	26.78
2008	26,975,594	11,088,122	46,137,259	-0.81
2009	30,411,162	12,533,405	53,714,914	16.42
2010	38,943,620	20,867,823	67,661,519	25.96

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung (diolah)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipungut dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi sektor pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak

tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi sektor pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Adapun pajak dari sektor pariwisata terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Tempat Hiburan dan Pajak Reklame.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Pajak Reklame di Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2010 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hotel	%	Pajak Restoran	%	Pajak Tempat Hiburan	%	Pajak Reklame	%
2005	2.822.523.175	-	2.525.343.666	-	651.855.000	-	1.363.328.892	-
2006	2.903.126.934	2,86	2.822.916.515	11,78	805.889.152	23,63	1.643.743.358	20,57
2007	3.486.255.200	20,09	3.346.527.082	18,55	1.087.445.300	34,94	2.006.875.011	22,09
2008	3.703.404.302	6,23	3.665.969.390	9,55	1.092.000.650	0,42	2.059.808.218	2,64
2009	4.157.117.559	12,25	4.576.424.522	24,84	1.486.131.507	36,09	2.425.847.135	17,77
2010	4.818.205.223	15,90	5.602.691.170	22,43	1.678.220.739	12,93	2.927.798.390	20,69
Rata-rata		8,19		12,45		15,43		11,97

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Bandar Lampung

Pada tabel 5. dapat dilihat pada tahun 2010 pertumbuhan pendapatan dari keempat objek pajak terus meningkat hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pajak hotel yang meningkat sebesar 15,90 persen, pajak restoran sebesar 22,43 persen, pajak tempat hiburan sebesar 12,93 dan pajak reklame sebesar 20,69 persen.

Seluruh pajak tersebut memiliki besaran tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

Tabel 6. Persentase Tarif Pajak Hotel, Restoran Tempat Hiburan dan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung

Jenis Pajak	Peraturan Daerah	Tarif (%)
Pajak Hotel	Perda No. 07 Tahun 2002 Pasal 5	10
Pajak Restoran	Perda No. 08 Tahun 2002 Pasal 5	10
Pajak Tempat Hiburan	Perda No. 10 Tahun 2002 Pasal 5	20
Pajak Reklame	Perda No. 03 Tahun 1999 Pasal 6	20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung

Pada tabel 6. tarif Pajak Hotel yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan perda No. 07 Tahun 2002 Pasal 5 sebesar 10 persen. Pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2002 Pasal 5 sebesar 10 persen. Pajak Tempat Hiburan yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2002 Pasal 5 sebesar 20 persen. Pajak Reklame yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan perda No. 03 Tahun 1999 Pasal 6 sebesar 20 persen.

Untuk menentukan besaran tarif pajak maka perlu dilihat perkembangan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhinya.

Tabel 7. Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008

Tahun	Inflasi (%)
2004	10.32
2005	5.44
2006	5.22
2007	21.17
2008	6.03
2009	6.58
2010	14.82

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 7. dapat dilihat tingkat inflasi Kota Bandar Lampung. Dimana inflasi Kota Bandar Lampung dari tahun 2004 sampai tahun 2010 semakin meningkat sehingga tingkat inflasi ini akan mempengaruhi besaran tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari tahun 2004 sampai 2010 tingkat inflasi semakin meningkat, maka kelayakan tarif retribusi dan tarif pajak pun dievaluasi untuk mengetahui berapa besar tarif pajak yang seharusnya.

Dengan demikian, pada perekonomian Kota Bandar Lampung yang semakin meningkat berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Kota Bandar Lampung pun terus meningkat, dan kegiatan ini tentunya memberikan gambaran bahwa masih ada potensi yang dijadikan peluang untuk menaikkan penerimaan

daerah berupa Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Bandar Lampung dari Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Pajak Reklame dengan menentukan besaran tarif pajak yang layak melalui perhitungan kembali sesuai dengan kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung saat ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka pada perkembangan perekonomian Kota Bandar Lampung yang semakin meningkat, yang menjadi permasalahannya adalah Berapa besarkah penetapan tarif Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Pajak Reklame yang masuk katagori yang layak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui besarnya Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Pajak Reklame yang layak dapat ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah yang didukung oleh potensi daerah dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daearah, diharapkan daerah tersebut dapat membiayai sendiri pembangunan di daerahnya dengan potensi yang ada. Suatu daerah dikatakan berhasil melaksanakan kebijakan sebagai daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam

mengelola keuangan daerah, salah satunya melalui pengelolaan retribusi dan pajak daerah.

Yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung adalah meningkatnya Pendapatan perkapita, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta pola konsumsi masyarakatnya.

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata yang merupakan katalisator pembangunan (*agent of development*). Dalam menuju kemandirian daerah, potensi pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Penerimaan dari sektor pariwisata ini berupa pajak dan retribusi. Pajak pada sektor pariwisata ini bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Tempat Hiburan, dan Pajak Reklame.

Karena pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat ini semakin meningkat maka perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran pajak pada sektor pariwisata, hal ini dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagan Kerangka Pemikiran

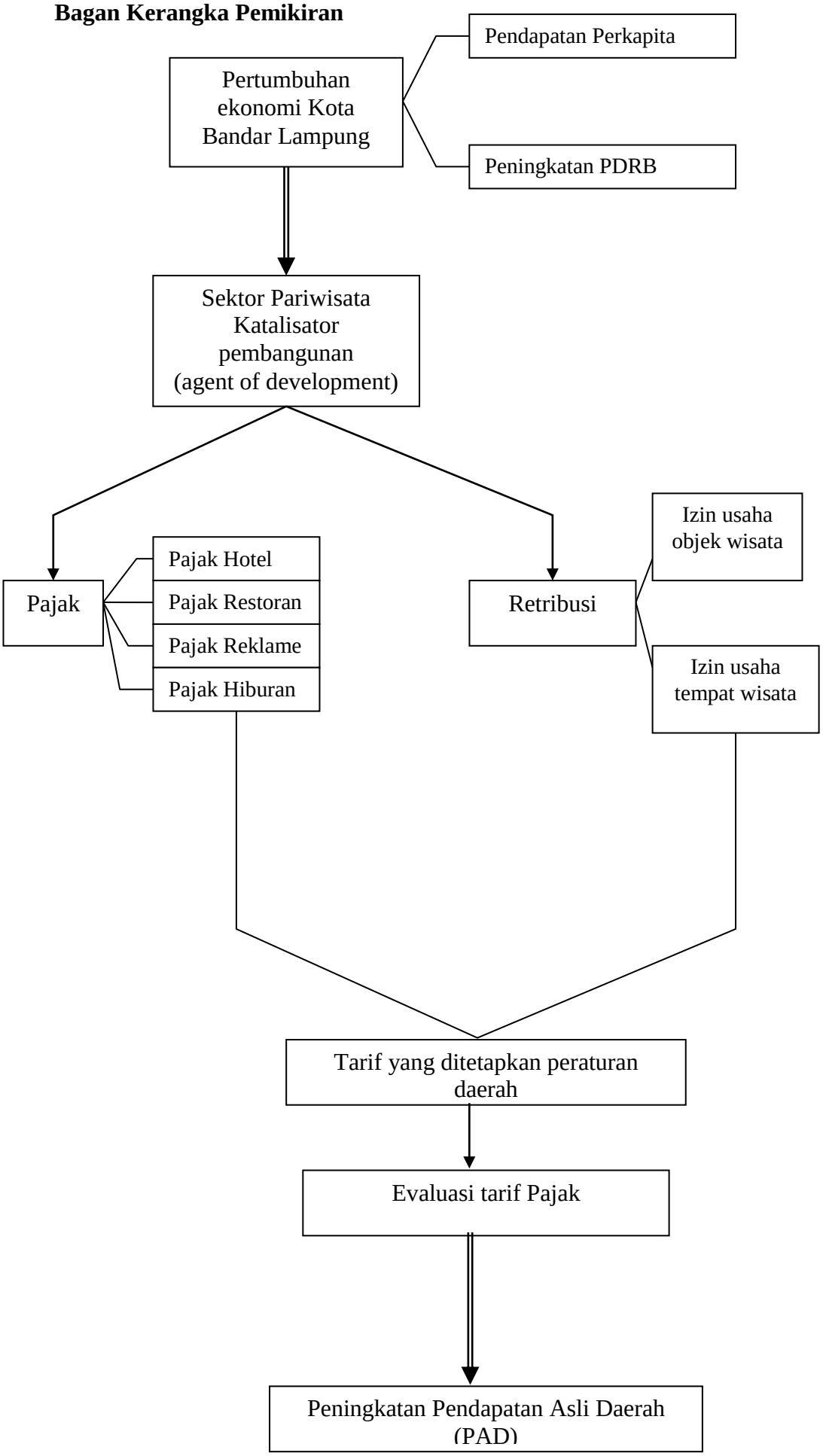

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab yang meliputi :

I. Pendahuluan meliputi latar belakang dan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan pustaka, mengenai teori-teori, bahan penelitian lain yang diperoleh dari pedoman yang dijadikan acuan untuk penelitian.

III. Metode penelitian meliputi alat analisis dan gambaran umum Kota Bandar Lampung

IV. Hasil dan Pembahasan

V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran